Legacy GUS DUR DAN AGENDA BANGSA INDONESIA

Ahmad Suaedy
Dewan Redaksi Jurnal Tashwirul Afkar & Eksekutif Direktur The Wahid Institute; Visiting Research Fellow 2010-2011 pada Center for Southeast Asian Studies (CSEAS)-Kyoto University, Kyoto, Jepang.

Memahami Gus Dur? Mungkin itu hal yang mustahil. Tapi mencoba menelusuri dan menafsirkan warisan *(legacy)* berharga dari salah satu pemimpin terbesar Indonesia ini dapat dipastikan sangatlah berguna. Salah satu hal penting dari warisan dia adalah pandangan dan aksinya tentang agenda perubahan dan strategi untuk Indonesia ke depan.

Kenapa penting? Karena Indonesia tampaknya kini memasuki tahap yang paling krusial untuk perubahan-perubahan selanjutnya. Ada berbagai isu mendasar dan sangat penting yang tampaknya diabaikan oleh para pemimpin Indonesia kini, khususnya pemimpin nasional, yang sesungguhnya sudah diberikan teladan dan dirintis oleh Gus Dur. Tidak tahu persis apakah hal penting itu memang sengaja ditunda sementara karena ada hal lain yang lebih mendesak, seperti penyelamatan kekuasaan, atau memang tidak dianggap penting.

Tetapi, sepuluh tahun setelah lengsernya Gus Dur dari kursi presiden, rasanya sudah cukup untuk kembali memunculkan agenda krusial tersebut. Dua *legacy* Gus Dur yang hendak ditonjolkan di sini adalah substansi dan strategi perubahan dan multikulturalisme.

Perubahan: Strategi dan Substansi

Dua kata kunci yang sering terdengar dari Gus Dur—sapaan akrab KH Abdurrahmawan Wahid—sejak tahun 1970-an adalah bahwa dia menentang revolusi dan anti kekerasan. Dua kata kunci tersebut bukan hanya dia terapkan dalam perubahan-perubahan yang dilakukannya di dalam NU maupun di Indonesia melainkan untuk dunia. Ketika ia muncul sebagai salah satu pemimpin muda Islam Indonesia di tahun 1970-an, di pusat Islam dunia yang lain sedang terjadi perubahan-perubahan yang sangat keras, konfrontasi, revolusi, pembunuhan dan kekerasan, seperti

misalnya di Mesir dengan Ikhwanul Muslim, serta sedang menuju kematangannya Revolusi Iran yang berpuncak pada 1979. Gejolak yang sama terjadi di Pakistan, Sudan dan sebagainya.

Gejolak pusat-pusat Islam yang sesungguhnya merupakan bagian dari kelanjutan pembebasan dari penjajahan Barat itu bagai wabah yang menular di seantero dunia, dengan hadirnya gerakan-gerakan Islam di hampir setiap negara, juga di negara-negara minoritas Muslim. Di Indonesia gerakan itu tumbuh subur di kampus-kampus besar sekuler di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan juga di luar Jawa. Jika kita baca lagi berbagai ceramah dan tulisan para pemimpin Islam di kampus saat itu dan juga gerakannya, akan terlihat jelas kiblat mereka: Mesir, Iran, dan Pakistan.

Kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi sangat besar untuk memimpin dunia Islam, belumlah tampak. Yang tampak adalah inferioritas Muslim Indonesia. Bahkan para sarjana yang datang dari belajar di Barat, Amerika dan Eropa sekali pun, ketika pulang ke Indonesia bukan menawarkan sesuatu yang ada di Barat atau Indonesia sendiri, melainkan dari daerah tersebut. Jadilah perguruan-perguruan tinggi sekuler Indonesia justeru menjadi pusat pengerahan ke arah kiblat tersebut. Di mata mereka, Indonesia seperti tidak punya apa-apa untuk memajukan Islam, dan karena itu harus berkiblat ke sana.

Gejolak respons terhadap hegemoni Barat, dan terutama kapitalisme global, sesungguhnya sedang terjadi di belahan dunia yang lain, yang tampaknya luput dari perhatian para pemimpin Islam, terutama, di kampus tersebut. Yaitu, teologi pembebasan di Amerika Latin dan anti Apartheid di Afrika Selatan. Dan, karena itu, di beberapa kampus di Indonesia ketika itu, tumbuh sayap yang lain, yaitu gerakan kritis terhadap kemapanan, terutama agama dan kekuasaan. Kritisisme itu muncul di samping pengaruh dari ilmu sosial kritis di Eropa, juga paling kuat dipengaruhi oleh teologi pembebasan, apakah langsung dari Amerika Latin atau dari India dan Filipina. Sejumlah pemikir kiri dari Timur Tengah juga memperkuat arus ini.

Beberapa tokoh pemuda dan mahasiswa Islam yang kritis terhadap gerakan Islam yang eksklusif yang hanya berkiblat pada dunia Islam tersebut, bergabung dalam kelompok kritis dan terutama di kampus-kampus Protestan dan Katolik. Nyaris tidak ada pemimpin Islam yang menonjol, terutama di kampus sekuler, yang memberikan perhatian dalam arti simpati terhadap gejala yang terakhir ini, kecuali Gus Dur. Cak Nur, tokoh Islam terkemuka yang sangat berjasa memperkenalkan toleransi dan pluralisme dan dianggap mentor gerakan Islam terkemuka, tidak menyentuh poros dan kiblat pemikiran dan gerakan yang disebut terakhir ini. Kader muda NU terutama non-strukttural umumnya bergabung dalam arus ini.

Gus Dur, ketika itu, sebagai respons bandingan terhadap gerakan Islam eksklusif di kampus sekuler, terus meneriakkan menetang revolusi dan anti kekerasan. Pesan itu tampaknya juga ditujukan untuk dunia Islam yang menjadi kiblat gerakan Islam kampus Indonesia tersebut. Dalam hal ini, tampaknya Gus Dur berada di atas *(beyond)* semua kiblat gerakan pemikiran dan aksi tersebut. Gus Dur dekat dan bergaul nyaris dengan semua lapisan dan faksi, termasuk gerakan Islam kampus sekuler yang selalu dia kritik. Gus Dur juga dekat dengan para pemikir sekuler dan aktivis HAM, dan bahkan dengan kalangan tentara (ABRI) yang hegemonik dan mengikuti pemikiran nasionalisme fasis—terima kasih kepada Daniel Dhakidae—yang pada saat yang sama sesungguhnya menjadi musuh bebuyutan gerakan Islam kampus tersebut. Di atas semuanya, Gus Dur mengaku membaca tafsir *Fi Dzilalil Qur'an* karya Sayyid Qutb, pemimpin Ikhwanul Muslim yang bentrok dengan presiden Gamal Abdul Nasser di Mesir.

Tentu saja, Gus Dur bukan tidak paham dengan Ikhwanul Muslimin maupun revolusi Iran. Ia tinggal di Kairo ketika Ikhwanul Muslimin sedang gencar dan kemudian berada di Baghdad, yang sangat dekat dengan Iran. Gus Dur sendiri—terima kasih kepada Greg Barton—mengaku pernah tertarik dan mempelajari secara detail tentang gerakan Ikhwanul Muslimin justru sebelum berangkat ke Kairo, ketika masih menjadi guru pesantren di Jombang. Tetapi ketika di Kairo, pekerjaan Gus Dur adalah nonton film dan baca buku di perpustakaan Kedutaan Amerika di Kairo ketimbang rajin kuliah dan ikut kegiatan keislaman mahasiswa di Universitas Al-Azhar, karena pelajaran di kampus itu dianggapnya sama dengan di pesantrennya. Tidak bisa dimungkiri pula bahwa karena pemahamannya kepada pemikiran dan kepemimpinan Abdul Nasser dan kemudian Saddam Hussen dengan partai Ba'ath di Irak, Gus Dur sangat akrab dengan ide dan gerakan kiri dan sosialisme.

Pada awal tahun 1980-an, baik kekerasan Ikhwanul Muslim di Mesir dan Revolusi Iran bisa dikatakan "telah selesai", dalam arti sudah bisa dilihat siapa pemenangnya, berbagai akibatnya, dan proses selanjutnya terhadap kekerasan, pembunuhan, dan provokasi terus berlanjut. Namun, Gus Dur melalui Nahdlatul Ulama menawarkan solusi lain, yaitu integrasi antara bangsa, negara dan Islam secara damai, melalui apa yang terkenal dengan Khittah NU 1926. Dua aspek penting dalam keputusan itu adalah: *pertama*, pengakuan Indonesia yang berdasar Pancasila—bukan Islam—sebagai bentuk final negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim dengan legitimasi teologis dalam pemahaman Islam Ahlussunnah wal Jamaah a la NU dan pesantren. *Kedua*, NU membebaskan umatnya untuk memilih partai pada pemilu menurut pilihan individu, tanpa preferensi agama. Keputusan itu diambil bahkan ketika agama-agama lain, termasuk Katolik dan Protestan dan tentu saja gerakan-gerakan Islam yang lain belum

mengambil keputusan tentang status Pancasila sebagai asas satu-satunya organisasi.

Tentu banyak kritik terhadap keputusan ini, bahkan dari kalangan kampus yang kurang memahami dasar pemikiran NU sebagai—dalam julukan Gus Dur sendiri—subkultur pesantren. Namun, bisa dimunculkan pertanyaan, apa yang terjadi seandainya NU tidak mengambil jalan Khittah NU 1926, terhadap NU, Islam, Indonesia dan juga masing-masing warga negara Indonesia? Mungkin lebih obyektif jika misalnya—tetapi bukan di sini tempatnya untuk menguraikan panjang lebar—dibandingkan dengan gejolak politik dan kekerasan yang terjadi di Mesir ketika pertikaian antara kepemimpinan Nasser dan Ikhwanul Muslim, antara Syah Iran dan Khomaini di Iran, Zia ul Haq di Pakistan, dan bahkan antara Soeharto dan Partai Komunis Indonesia. Gerakan Islam kampus yang eksklusif dan provokatif ketika itu pun mentah karena Khittah NU ini.

Dalam ranah pemikiran Gus Dur, integrasi bangsa, negara dan Islam Indonesia mungkin belum tampak landasan metodologis dan ilmiah yang sistematis, tetapi apakah hal itu juga menjadi tugasnya? Sayangnya, momentum Khittah NU 1926 itu, bahkan di kalangan NU sendiri, apalagi di kalangan yang lain termasuk perguruan tinggi di Indonesia, belum menjadi eksplorasi yang luas dan mendalam tentang perkembangan pemikiran dan gerakan Islam Indonesia. Para pemikir Islam Indonesia tampaknya lebih tertarik terhadap gerakan Islam simbolik dan maaf agak picisan yang seolah sebagai gejala substansi Islam itu sendiri.

Paham Kebangsaan: Kesetaraan dan Multikulturalisme

Kesejalanan Gus Dur dan NU dengan pemerintah Soeharto tentang kedudukan Pancasila ketika itu tidak dengan sendirinya memiliki agenda yang sama. Jika pemerintah dan militer yang hegemonik dalam kekuasaan Orde Baru menjadikan satu-satunya asas Pancasila sebagai pengukuhan terhadap paham nasionalisme fasis untuk memaksa yang lain, maka Gus Dur sebaliknya. Ia, bagi Gus Dur, justru untuk membuka dan mengikis paham fasisme tersebut. Tidak lama setelah Khittah NU 1926 ditetapkan, Gus Dur melanjutkan kegiatannya bergabung dengan para aktivis kritis terhadap pemeritah dan aktivis HAM yang notabene menjadi musuh utama Soeharto dan militer. Gus Dur bahkan dekat dan melindungi korban dan pihak-pihak yang didiskriminasi oleh Orde Baru seperti korban kekerasan 1965 dan mereka yang dituduh sebagai anggota PKI yang terlibat dalam gerakan G 30 S, dan juga kalangan yang secara diskriminatif disebut sebagai Gerakan Separatis, terutama di Papua dan Aceh. Mereka dalam konteks Orde Baru hanyalah separo warga negara, karena sebagian hak-hak kewarganegaraannya dirampas. Sembari mengkritik cara-cara kekerasan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun para pengkritik dan lawannya, Gus Dur terus dekat dan simpati terhadap

mereka. Gus Dur juga membela kelompok-kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan serta *indigenous people* sebagai kelompok minoritas yang tertindas di masa Orde Baru sampai sekarang.

Dalam tafsir Pancasila ini, secara ideologis Gus Dur praktis berada di seberang pemerintah/Pancasila Soeharto yang fasis. Meski demikian, Gus Dur masih dekat dengan kalangan militer dan eksponen tertentu Orde Baru, paling tidak faksi tertentu yang mulai risih atau kritis terhadap Soeharto dan para kroninya. Gus Dur—terima kasih kepada Douglas Ramage—menggunakan diskursus Pancasila untuk melawan otoritarianisme Soeharto yang menggunakan Pancasila sebagai landasan argumen dan kebijakannya. Posisi berseberangan itu mencapai puncaknya ketika untuk mempertahankan kekuasaan dan nasionalisme fasis Orde Baru, Soeharto menggandeng gerakan Islam sektarian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di bawah kepemimpinan B.J. Habibie yang sebagian besar terdiri dari para aktor pemimpin Islam kampus di tahun 1970 dan 1980-an. Sementara Gus Dur meneruskan upaya pembebasan dari otoritarianisme dan fasisme, rupanya kolaborasi Islam sektarian-fasis itu tidak bisa menyelamatkan Soeharto dari puncak kekuasaan lebih lama, dan akhirnya tumbang. Meski Habibie sebagai pemimpin ICMI bikinan Soeharto berhasil menggantikannya, tetapi tidak dengan sendirinya mampu membawa garbong ICMI menguasai kekuasaan, karena ICMI sendiri sejak awal telah diboncengi para kroni dan loyalis Soeharto yang hanya karbitan di dalam ICMI.

Tetapi Gus Dur tidak benar-benar berseberangan dengan Soeharto, karena dalam sejumlah momen politik Gus Dur bertemu dengannya. Di sisi lain sedang terjadi konsolidasi yang sangat kuat di kalangan nasionalis yang untuk beberapa tahun terakhir menjelang lengsernya, menjadi musuh utama kekuasaan Soeharto, yaitu kelompok politik nasionalis yang mengerucut pada kepemimpinan Megawati Sukarnoputri yang ketika itu Gus Dur juga menjadi bagian dari konsolidasi tersebut. Sidang Umum MPR hasil pemilu 2009 adalah puncak dari ketegangan dua kubu yang saling berhadapan dan memperebutkan posisi presiden, yaitu kubu Habibie (Islam) yang membawa gerbong partai Golkar sebagai pemenang pemilu urutan kedua dan kubu Megawati (nasionalis) yang membawa gerbong PDIP sebagai pemenang pertama. Meski saling berhadapan, tetapi keduanya sesungguhnya diboncengi oleh kepentingan politik eksponen Orde Baru loyalis Soeharto dan militer. Sedangkan Gus Dur yang membawa gerbong PKB sebagai partai pemenang keempat, sebagai kuda hitam. Pemilu presiden itu dimenangkan oleh kuda hitam. Dalam konteks ketegangan politik yang berhadap-hadapan dua kubu itu, Gus Dur menjadi penengah, mengingat Gus Dur sangat dekat dan bahkan sebagai pelindung Megawati sejak keduanya menjadi musuh utama Soeharto di masa-masa akhir kepemimpinannya. Tetapi, pada saat yang sama Gus Dur adalah juga

pilihan kubu Habibie ketika laporan pertanggungjawabannya ditolak di SU MPR dan tidak mungkin lagi untuk maju sebagai calon presiden berhadapan dengan Megawati.

Dari semua cerita di atas, yang terpenting adalah kebijakan-kebijakan Gus Dur pasca terpilih sebagai presiden. Ia segera meluncurkan program kesetaraan warga negara di depan hukum, undang-undang dan konstitusi bagi semua warga negara tanpa pandang bulu untuk memecah dan menghapus landasan nasionalisme fasis a la Orde Baru dan Militer yang berkedok Pancasila. Ia, misalnya, meminta maaf kepada korban kekerasan 1965 dan hendak menghapus sandaran hukum untuk mendiskreditkan mereka, yaitu TAP MPRS no XXV tahun 1966. Perangkat hukum inilah yang hingga kini dipakai untuk mendiskreditkan kelompok masyarakat tertentu dan menjadikannya warga negara kelas dua. Gus Dur juga membalik strategi melalui dialog damai dan setara dengan kelompok yang selama ini didiskriminasi sebagai gerakan separatis, yaitu GAM dan OPM. Tentu saja Gus Dur tidak akan mengijinkan mereka untuk merdeka menjadi negara sendiri, tetapi hendak menerapkan multikulturalisme, dimana semua kelompok bangsa memiliki hak yang sama dan harus dihormati sebagai bagian bangsa yang memiliki ciri-cirinya sendiri dalam identitas nasional. Gus Dur, sebagai presiden, mengutus seorang sipil, yaitu Bondan Gunawan sebagai sekretaris kabinet untuk bertemu dengan Abdullah Syafi'i sebagai komandan perang GAM di lapangan untuk melakukan pembicaraan dan negosiasi damai dan setara. Gus Dur juga memberi tempat yang terhormat kepada budaya Papua dengan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Bahkan Gus Dur mengijinkan bendera Bintang Kejora, yang oleh Orde Baru dianggap separatis, untuk dikibarkan sebagai simbol budaya Papua.

Dengan lengsernya Gus Dur dari kursi presiden, Indonesia telah kembali jatuh pada nasionalisme fasis Orde Baru, hingga kini. Nyaris tidak ada pemimpin nasional satu pun yang secara terbuka mengagendakan pengembalian kesetaraan warga negara dengan memasukkan di dalamnya para korban kekerasan 1965-1966 dan eksponen yang secara salah dijuluki gerakan separatis. Dalam konteks mencegah kembalinya Pancasila fasis ini pula harusnya dipahami langkah drastis Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden. Upacara hari kesaktian Pancasila yang mengambil tempat di Lubang Buaya, menunjukkan bangsa Indonesia secara ideologis masih terkungkung di bawah hegemoni militer yang mendasarkan Pancasila pada ideologi fasis, rongsokan Perang Dunia II. Saya setuju dengan Kiai Imam Aziz dalam artikel di edisi ini, bahwa untuk melakukan rekonsiliasi seorang pemimpin yang hanya membutuhkan hal yang gampang. Tetapi, untuk sampai ke sana, diperlukan pemimpin yang terlebih dahulu memiliki komitmen ideologi anti fasisme, atau setidaknya bukan fasis.

Langkah yang sama, sebagai presiden Indonesia, Gus Dur lakukan dalam

lingkup regional dan global. Ia secara intensif, baik di istana maupun di tempat lain seperti di Kuala Lumpur, secara regular bertemu dengan kelompok-kelompok yang dianggap separatis di negara tetangga seperti di Filipina yang terkenal dengan Bangsamoro dan di Thailand Selatan yang dikenal dengan Patani, tanpa merusak hubungan Indonesia dengan negara-negara tersebut. Juga sudah cukup lama Gus Dur sangat memperhatikan nasib minoritas Sinhala di Sri Langka dan Rohingnya di Myanmar, serta Champa di Kamboja dan Vietnam.

Refleksi Teoritis: *'War of Position'* dan Multikulturalisme

Pertanyaan berikutnya adalah apakah langkah-langkah Gus Dur itu hanya begitu saja terjadi atau memiliki dasar teoritiknya? Karena begitu kuatnya—menggunakan teminologi Antonio Gramsci—hegemoni Orde Baru, tidak hanya melalui konsensus atau perangkat lunak seperti pendidikan, perundangan, dan agama tetapi juga *coercion* atau pemaksaan dan kekerasan, maka diperlukan langkah *counterhegemony* untuk mengubahnya. Sebagaimana hegemoni ada dua bentuk, menurut Gramsci, demikian juga *counterhegemony*, yaitu *'war of movement'* dan *'war of position'*. Menurut Gramsci, ketika masyarakat telah siap untuk melakukan perubahan radikal maka *'war of movement'* bisa dipakai untuk melakukan perubahan, dengan konsekuensi perebutan kekuasaan secara langsung dan mungkin tidak terhindarkan terjadinya kekerasan. Ketika gerakan itu menang maka akan berubah posisi menjadi hegemon, atau paling tidak setara.

Tetapi, ketika rakyat belum siap untuk melakukan gerakan seperti itu maka strategi yang paling mungkin adalah melakukan penyadaran untuk tujuan perubahan berkelanjutan atau *'war of position'*, suatu strategi gradual dengan tetap mengagendakan perubahan radikal. Tampaknya, Gus Dur berada pada posisi strategi yang disebut Gramsci terakhir. Gus Dur, meskipun berseberangan secara ideologis dan agenda politik dengan Orde Baru, tetapi ia tidak pernah benar-benar putus hubungan secara permanen dengan Soeharto dan militer. Ketika tersedia peluang sekecil apapun untuk mempengaruhi sebuah pandangan, apalagi suatu kebijakan yang strategis, maka ia akan memanfaatkannya dan bahkan mendukung kebijakannya. Namun, ia juga tidak segan untuk melakukan oposisi langsung, seperti ketika dikutip sebuah buku dengan menjuluki Soeharto sebagai *'stupidity'* dan menulis surat secara langsung untuk memperingatkan Soeharto tentang bahaya sektarianisme lewat ICMI, ketika dia mengadakan rapat akbar kesetiaan terhadap Pancasila oleh NU di Jakarta.

Dalam literatur gerakan sosial, suatu gerakan tidak selalu harus berhadap-hadapan dengan penguasa secara terus menerus, dan bahkan tidak harus terorganisasi oleh suatu pusat kepemimpinan dan struktur organisasi yang ketat. Ia mengandalkan pendidikan dan penyadaran tentang tantangan yang di-

hadapi, terutama ketertindasan atau *asymmetric relation*. Karena itu, perubahan-perubahan yang dibawa oleh gerakan sosial tidak selalu linier dan tidak selalu menang secara politik kekuasaan, melainkan ia menjadi agenda jangka panjang yang bersinambung tapi radikal.

Akan halnya agenda kesetaraan warga negara yang telah tercabik oleh pendekatan kekerasan Orde Baru yang berbasis nasionalisme fasis, maka multikulturalisme sebagai alternatif paling strategis. Dalam pandangan multikulturalisme, semua kelompok sosial dan budaya dalam sebuah negara, terutama yang minoritas, harus diberi tempat yang sama. Ini berbeda dengan nasionalisme fasis yang mengharuskan keseragaman dan kelompok-kelompok suku dan minoritas harus mengikuti mayoritas dengan cara asimilasi atau pemaksaan. Gerakan ini muncul justru karena pengaruh globalisasi yang cenderung hegemonik. Dalam konteks negara-bangsa, multikulturalisme tidak dengan sendirinya linier dengan pemisahan diri, federasi, kemerdekaan dan bahkan otonomi politik. Di Eropa, multikulturalisme merupakan respons terhadap hegemoni demokrasi liberal—merupakan kelanjutan dari respons terhadap fasisme—yang cenderung hanya berbasis pada hak-hak individu (*individual rights*). Menurut Will Kymlicka, misalnya, karena demokrasi liberal tekanannya yang berlebihan pada hak-hak individu maka melupakan hak-hak kolektif terutama hak komunitas minoritas. Dalam multikulturalisme, kelompok-kelompok itu harus diberi keleluasaan berekspresi sebagai bagian dari representasi identitas nasional. Dalam hal ini, Gus Dur telah melakukan secara kongkret perubahan itu sebelum kata multikulturalisme dikenal luas dalam masyarakat Indonesia.

Dengan segala keterbatasan yang ada, The Wahid Institute ingin mengambil peran untuk terus memperdalam dan memperjuangkan agenda dan strategi Gus Dur di atas. []